

TAJUK RENCANA

Perundangan, Ancaman Bonus Demografi

PERNYATAAN Mensos Tri Rismaharini, kekhawatiran terhadap meningkatnya kasus anak-anak yang depresi, gara-gara perundangan (KR 11/12) membuat miris. Kasus perundangan yang makin meningkat di sekitar kita, menciptakan beban psikologis yang sangat signifikan bagi anak tersebut.

Ajakan Mensos agar masalah perundangan, yang menyangkut Kesehatan psikologis anak harus mendapat perhatian. Mengapa? Sebab anak-anak adalah harapan besar bangsa untuk memimpin masa depan. Yakni menghadapi apa yang disebut bonus demografi.

Kita tahu Indonesia diperkirakan akan menghadapi era bonus demografi beberapa tahun ke depan, tepatnya pada 2030 hingga 2040 mendatang. Bonus demografi yang dimaksud adalah masa di mana penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan lebih besar dibanding usia non-produktif (65 tahun ke atas), dengan proporsi lebih dari 60% dari total jumlah penduduk Indonesia.

Bonus demografi tersebut adalah peluang kesempatan strategis bagi Indonesia, untuk melakukan berbagai percepatan pembangunan dengan dukungan sumber daya manusia (SDM) berusia produktif yang melimpah. Terlebih lagi, pada tahun 2030 terdapat agenda besar pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Hal tersebut searah dengan program pemerintah yang mencanangkan Visi Indonesia Emas tahun 2045. Tercapainya misi tersebut sejalan harapan terciptanya generasi produktif yang berkualitas.

Meskipun bonus demografi dapat memberikan peluang ekonomi yang besar, namun ada beberapa ancaman yang dapat muncul seiring dengan fenomena ini. Yakni bila tidak dimanfaatkannya potensi ekonomi. Jika pemerintah tidak mampu menciptakan lapangan kerja yang cukup atau memberikan pendidikan dan pelatihan yang diperlukan kepada populasi usia produktif, bonus demografi dapat menjadi beban ekonomi daripada keuntungan.

Program pelatihan keterampilan dapat membantu mengarahkan bonus demografi ke arah yang produktif, dengan meningkatkan kualifi-

ikasi tenaga kerja. Karena itu pengembangan karir dan peluang kerja, mendorong pertumbuhan sektorsektor ekonomi yang menciptakan lapangan kerja. Maka sejak awal, perlu fasilitasi kemitraan antara perguruan tinggi, pelaku industri, dan pemerintah untuk menciptakan program magang, kerja sama riset, dan peluang karir bagi lulusan.

Fokus pada efisiensi energi dan penggunaan sumber daya lainnya, untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Maka jangan dilupakan, sangat penting menciptakan investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk perempuan juga, agar mereka dapat berkontribusi secara maksimal pada ekonomi. Kebijakan yang mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi dapat membantu meningkatkan partisipasi tenaga kerja wanita.

Namun tekanan pada infrastruktur dan layanan kesehatan, harus diperhatikan juga. Sebab peningkatan jumlah populasi usia produktif, dapat menempatkan tekanan pada infrastruktur kesehatan dan layanan masyarakat. Jika tidak ada investasi yang cukup dalam infrastruktur, seperti rumah sakit, sekolah, dan transportasi, dapat berdampak pada tekanan yang signifikan.

Jika bonus demografi tidak dikelola dengan baik, dapat muncul ketidakstabilan sosial. Ketidakpuasan dari kelompok yang merasa tidak mendapatkan manfaat dari perkembangan ekonomi, sehingga menjadi ancaman ketegangan sosial.

Bonus demografi memberikan keuntungan ekonomi dalam jangka pendek, jika tidak ada kebijakan untuk mengatasi penurunan tingkat kelahiran, populasi akan cenderung menua setelah periode bonus demografi berlalu. Ini dapat menyebabkan peningkatan beban bagi sistem pensiun dan kesehatan.

Jika pertumbuhan ekonomi tidak merata atau tidak diakses secara adil oleh seluruh populasi, bonus demografi dapat meningkatkan ketidaksetaraan pendapatan dan kesenjangan sosial. Maka sangat penting, pemerintah musti menciptakan kebijakan dan strategi yang tepat untuk memanfaatkan bonus demografi dengan baik. (***)

UMP, Masih Jauh dari Harapan ?

Mustika P Kusumawati

dasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Celaknya lagi, upah minimum ini lah yang dijadikan dasar penghitungan



KR-JOKO SANTOSO

berbagai jenis pengupahan lainnya. Sehingga tidak heran jika pekerja/buruh maupun serikat pekerja/buruh semakin vokal menyampaikan apa yang menjadi harapannya untuk perbaikan kesejahteraan mereka. Momen unjuk rasa pun dijadikan sebagai panggung penyampaian aspirasi.

Adapun Gubernur harus menetapkan UMP paling lambat tanggal 21 November tahun berjalan. Sedangkan untuk UMK baru ditetapkan setelah adanya penetapan UMP dengan batasan paling lambat tanggal 30 November tahun berjalan. Penghitungan UMP dilakukan dewan pengupahan provisi, demikian pula untuk UMK di mana penghitungannya dilakukan oleh dewan pengupahan kabupaten/kota. Dewan pengupahan sendiri

Berimbab

Secara matematika nominal UMP & UMK mengalami kenaikan namun kenyataannya masih jauh dari harapan para pekerja/buruh. Mengapa demikian ? Maraknya tuntutan kenaikan upah yang disampaikan pekerja/buruh maupun serikat pekerja/serikat buruh ini berimbab pada keberlangsungan hidup mereka di tahun depan. Meski pun secara teori sudah ada upaya penghitungan yang di-

Azsep Kurniawan

sebagai tenaga kerjanya. Kini konsepnya sudah berubah, lebih pada pemerataan kesejahteraan, pemerataan pembangunan serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Selama ini bukan berarti perjalanan transmigrasi berjalan baik-baik saja dalam mempersatukan negeri. Setidaknya ada dua isu yang bisa mengganggu semangat persatuan dan kesatuan pada tranmigrasi. *Pertama*, resistensi penduduk lokal. Ada kekhawatiran dari penduduk lokal, transmigrasi hanya akan 'merampas' hak politik, hak budaya dan hak ekonomi masyarakat lokal oleh para pendatang.

Kedua, sengketa lahan. Selama ini program transmigrasi membutuhkan lahan untuk dibagikan ke transmigran. Minimal membutuhkan 1 ha, dimana lahan pekarangan seluas 0,25 ha dan lahan usaha (LU) I seluas 0,75 ha. Belum lagi, kalau ditambah LU II seluas 1 ha. Sengketa lahan biasa terjadi karena status lahan dan batas lahan yang belum jelas. Ditambah, ada perilaku transmigran yang terlalu bersemangat menggarap lahan sampai tak tahu batas lahan tetangganya.

Apabila kedua hal tidak segera ditangani bisa menjadi pemicu disintegrasi. *Pertama*, perlu komunikasi intensif antara pemerintah dan masyarakat lokal agar tidak terjadi mis-komunikasi. Tidak perlu merasa iri atas fasilitas rumah dan lahan yang diberikan ke transmigran.

Bhinneka Tunggal Ika

Pada dasarnya transmigrasi menjadi cerminan Bhinneka Tunggal Ika, ada percampuran antara Transmigran Penduduk Setempat (TPS) dan Transmigran Penduduk Asal (TPA). Percampuran ini penting agar bisa saling mengenal dan belajar satu sama alain. *Kedua*, terkait lahan maka seharusnya dipastikan agar lahannya *clean and clear* (2C). *Clear* yaitu jelas letak, batas fisik yang tergambar dalam peta. *Clean* yaitu bebas dari masalah hukum, adat dan sosial. Ini penting agar tidak ada sengketa dikemudian hari.

Dalam perjalanannya, sampai saat ini transmigrasi terbukti menyatukan negeri. Menjadi perekat antarberbagai suku bangsa yang hidup bersama dalam satuan permukiman. Saling bahu membahu demi kehidupan yang lebih baik. Jayalah terus transmigrasi.

*)**Azsep Kurniawan, Fungsional PSM BBPPM Yogyakarta Kementerian Desa PDT Transmigrasi.**

Pojok KR

Debat Pilpres 2024 dimulai.
- **Adu program, bukan debat saling menjatuhkan.**

Korban kecelakaan di Sleman usianya 15 - 24 tahun.
- **Di atas usia tersebut bukan berarti aman kecelakaan.**

Penipu pengguna uang ditangkap.
- **Hari gini, masih ada yang percaya dukun pengguna uang?**

Berabe

PIKIRAN PEMBACA

Naskah bisa dikirim Email atau WA
pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/Scan KTP
atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40 - 42 Yogyakarta 55323.
Naskah tidak berisi ujaran kebencian,SARA dan Hoaks.
Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Menghadapi Kemacetan Libur Nataru

TIDAK lama lagi, Yogya kemungkinan besar bakal macet. Puncak Mudik Nataru, diperkirakan tinggal beberapa hari lagi. Karena itu mudah-mudahan tak ada lagi pelobangan jalan yang bisa membuat macet lebih panjang dan parah. Kalau memang harus ada pelobangan jalan raya ditunda dulu setelah mudik lebaran berlalu. Atau mungkin bisa dipindahkan dulu di area jalan yang tidak strategis yang mungkin juga bakal di lobangi.

Saya melihat ada jalan yang meski baru saja dilobangi, kemudian diaspal tetapi tidak lama kemudian dilobangi lagi meski hanya sedikit. Ini yang membuat jalanan semakin parah macetnya nanti. Apa tidak mungkin pelobangan jalan direncanakan secara terpadu. Sebagai pengguna jalan saya maklum untuk penanaman kabel, pipa atau gorong-gorong namun terkesan sendiri-sendiri.

Suwarjanto SH, Tegal Kemuning, Yogyakarta

Musim Hujan dan Penggalan Jalan

HUJAN mulai turun, bahkan sudah bisa dikatakan setiap hari hujan. Yang aneh dan menarik, beberapa jalan di Yogya ini mulai digali dan ri maaf ri mengganggu lalu lintas. Karena kemudian jalan dimana ada penggalan jalan telah macet.

Pertanyaan saya yang awam, mengapa penggalan jalan di-

lakukan pas setelah memasuki hujan dan di akhir tahun yang bakal libur panjang? Padahal beberapa bulan lalu panas terik melanda Yogya, kenapa saat itu tidak dilakukan perbaikan jalan atau penggalan jalan? Apakah ini terkait prioritas pembangunan atau anggaran?

Nurahman, Muja-yuga Umbulharjo Kota Yogya

Kedaulatan Rakyat

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **General Manager :** H Yoeke Indra Agung Laksana, SE. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswoto Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Dra Hj Fadmi Sustiwati, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris). Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm . Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif . Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penasihat: Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Redaksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Ishaq Zubedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP